

Assessing Tourism Development Through The CIPP Model (Context, Input, Process, Product): A Case Study Of Maitara Island, Tidore City, North Maluku

Mengkaji Pengembangan Pariwisata Melalui Model CIPP (Context, Input, Process, Product): Studi Kasus Pulau Maitara, Kota Tidore, Maluku Utara

Fergiawan^{1,2*}, Muhammad Yopan¹

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Kebijakan Publik Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

² Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tidore, Maluku Utara

fergiawan20@ui.ac.id¹, muhamad.yopan18@ui.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

Maitara Island, located within the Tidore Islands City of North Maluku, exhibits considerable potential for marine tourism development. Nonetheless, this potential faces several obstacles, including inadequate infrastructure, limited involvement from the local community, and a lack of diversity in tourist attractions. This study aims to evaluate the effectiveness of the tourism attraction development program on Maitara Island using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. Employing a descriptive qualitative approach, this research incorporated various data collection methods, including in-depth interviews, observations, and document analysis, involving stakeholders such as local government officials, business representatives, and community members. The findings indicate that, from a contextual viewpoint, the tourism development program aligns with regional needs and complies with national tourism policies. This study highlights the necessity of addressing the identified challenges by underscoring the relevance of these tourism development initiatives to the region's strategic objectives. Future endeavors should prioritize enhancing infrastructure, fostering greater community participation, and diversifying tourist attractions to fully capitalize on the island's tourism potential and promote sustainable regional economic growth. The evaluation of the inputs identified several significant limitations, including budget constraints, a lack of sufficient human resources, and inadequate infrastructure. Regarding program implementation, effectiveness was hindered by weak cross-sector coordination and limited community engagement. While the product evaluation showed increased tourist visits, the economic benefits to the local community were minimal. In summary, the Maitara Island tourism development program requires enhancements in resource allocation, capacity building within institutions, and community empowerment to ensure sustainability. Policy recommendations should focus on increasing budgetary support, providing training for human resources, and integrating community-based initiatives.

Keywords: policy evaluation, sustainable tourism, CIPP model, Maitara Island, destination development

ABSTRAK

Pulau Maitara yang terletak di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan wisata bahari. Namun demikian, potensi ini menghadapi beberapa kendala, termasuk infrastruktur yang kurang memadai, keterlibatan masyarakat lokal yang masih terbatas, dan kurangnya keragaman atraksi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pengembangan atraksi wisata di Pulau Maitara dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah daerah, perwakilan bisnis, dan anggota masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dari sudut pandang kontekstual, program pengembangan pariwisata selaras dengan kebutuhan daerah dan sesuai dengan kebijakan pariwisata nasional. Studi ini menyoroti perlunya mengatasi tantangan yang teridentifikasi dengan menggarisbawahi relevansi inisiatif pengembangan pariwisata ini dengan tujuan strategis daerah. Upaya di masa depan harus memprioritaskan peningkatan infrastruktur, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar, dan mendiversifikasi atraksi wisata untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi pariwisata pulau ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap masukan mengidentifikasi beberapa keterbatasan yang signifikan, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan infrastruktur yang tidak memadai. Terkait dengan implementasi program, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya koordinasi lintas sektor dan terbatasnya keterlibatan masyarakat. Meskipun evaluasi produk menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan, manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal masih sangat minim. Singkatnya, program pengembangan pariwisata Pulau Maitara membutuhkan peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan kapasitas lembaga, dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan. Rekomendasi kebijakan harus berfokus pada peningkatan dukungan anggaran, penyediaan pelatihan untuk sumber daya manusia, dan mengintegrasikan inisiatif berbasis masyarakat.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, pariwisata berkelanjutan, model CIPP, pengembangan destinasi

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan nasional dan daerah, terus mendorong pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara terencana dan terstruktur [1]. Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama di era globalisasi ini [2]. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber devisa negara [3][4]. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan berbagai destinasi wisata agar dapat bersaing di tingkat global [5].

Namun, pengembangan pariwisata juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangannya adalah bagaimana mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan [5]. Pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan integrasi antara keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi [6]. Selain itu, perubahan pola wisatawan dan psikografi pelancong juga mempengaruhi model pengembangan pariwisata yang perlu diperhatikan [7]–[9].

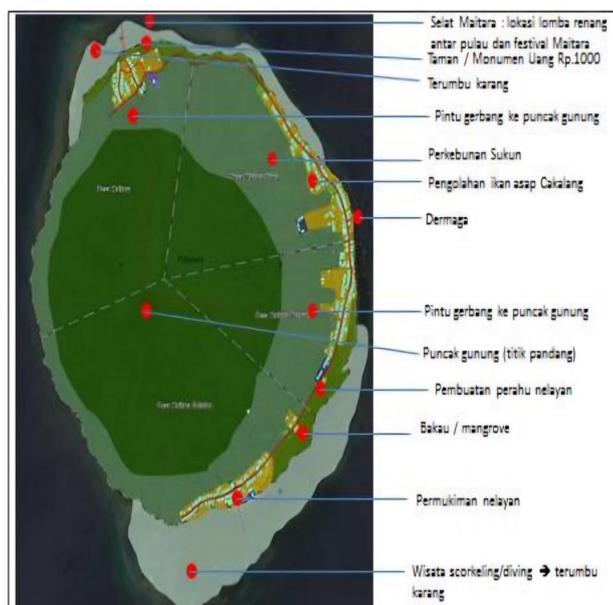
Perencanaan dan pengembangan objek wisata memerlukan strategi yang tepat agar potensi wisata dapat dimanfaatkan secara optimal [10]. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan pembangunan pariwisata, yang tertuang dalam rencana induk kepariwisataan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota [11]. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dari pembangunan pariwisata berkelanjutan [12]. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pariwisata dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan.

Meskipun Pulau Maitara memiliki daya tarik yang beragam dan berpotensi menjadi destinasi unggulan dalam sektor pariwisata bahari dan ekowisata, namun kondisi aksesibilitas menuju pulau ini masih menjadi kendala utama, dimana masih terbatasnya akses transportasi. menyebabkan wisatawan harus menempuh perjalanan yang tidak selalu mudah, sehingga mengurangi daya tarik pulau ini bagi wisatawan yang mengutamakan kenyamanan dalam perjalanan mereka.

Tidak hanya aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan serius dalam pengembangan pariwisata di Pulau Maitara. Minimnya fasilitas akomodasi, restoran, serta pusat informasi wisata membuat wisatawan yang datang ke pulau ini tidak dapat menikmati fasilitas yang memadai. Dalam konteks pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, keberadaan infrastruktur dasar seperti dermaga, jaringan transportasi yang memadai, serta fasilitas kebersihan menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya tarik wisata.

Selain tantangan infrastruktur, keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata masih relatif rendah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat pariwisata menyebabkan banyak masyarakat belum memahami bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di pulau mereka sendiri. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Keterlibatan mereka tidak hanya sebatas sebagai penyedia layanan wisata, tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata.

Salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata adalah Pulau Maitara, yang terletak di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pulau ini memiliki daya tarik wisata yang unik, termasuk keindahan pantai, keanekaragaman hayati laut, serta nilai sejarah dan budaya yang kuat. Namun, pengembangan daya tarik wisata di Pulau Maitara masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek perencanaan, infrastruktur, maupun pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan.



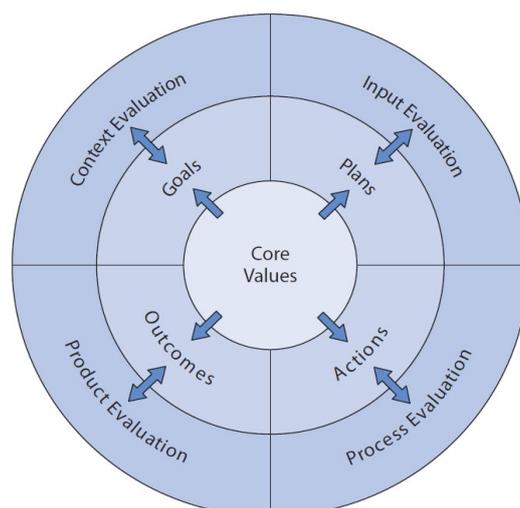
Sumber: Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata Pulau Maitara Tidore Selatan

Gambar 1. Sebaran Daya Tarik Wisata di Pulau Maitara

Pulau Maitara memiliki potensi wisata yang sangat besar, namun hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal (lihat Gambar 1). Keindahan pantai berpasir putih yang mengelilingi pulau, ekosistem terumbu karang yang masih terjaga, serta keberagaman budaya lokal merupakan aset utama yang dapat dikembangkan dalam sektor pariwisata. Akan tetapi, berbagai tantangan masih menjadi hambatan dalam upaya pengembangan kawasan ini, mulai dari keterbatasan aksesibilitas, minimnya infrastruktur pendukung, hingga rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut, strategi pengembangan pariwisata di Pulau Maitara harus dilakukan berbasis keberlanjutan. Langkah awal yang dapat diambil adalah dengan melakukan evaluasi dengan menggunakan model CIPP mencakup empat aspek utama. Evaluasi *Context* berfokus pada relevansi kebijakan pengembangan daya tarik wisata dalam konteks kebutuhan daerah dan masyarakat. Evaluasi *Input* menilai kualitas perencanaan, sumber daya, dan strategi yang diterapkan dalam pengembangan wisata Pulau Maitara. Evaluasi *Process* mengevaluasi implementasi kebijakan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan wisata. Sementara itu, evaluasi *Product* mengukur hasil dan dampak dari pengembangan daya tarik wisata terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Pulau Maitara.

Model evaluasi *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) adalah salah satu pendekatan evaluasi program yang komprehensif dan berorientasi pada keputusan [13]–[17]. Model ini pertama kali dikembangkan Daniel L. Stufflebeam pada akhir 1960-an sebagai kerangka untuk membantu para pengambil keputusan dalam menilai dan meningkatkan program secara sistematis. Bertujuan tidak sekadar *‘‘membuktikan’’* melainkan memperbaiki’’ program melalui umpan balik berkelanjutan pada tiap tahap [18]. Model ini telah digunakan secara luas dalam berbagai evaluasi program publik, termasuk sektor pendidikan maupun pariwisata, karena sifatnya yang menyeluruh dan berorientasi pada perbaikan [19]–[21]



Sumber: [13]–[17]

Gambar 2. Model Evaluasi CIPP

CIPP sering disebut *decisionoriented evaluation* model karena fokusnya pada penyediaan informasi evaluatif yang berguna untuk menentukan apakah suatu program perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan demi perbaikan masa. Berbeda dengan model evaluasi tradisional yang hanya menekankan hasil akhir, CIPP mencakup evaluasi sejak tahap awal program hingga output, dengan tujuan mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan program.

Dalam konteks pengembangan daya tarik wisata Pulau Maitara di Kota Tidore Kepulauan, model CIPP dapat memberikan kerangka evaluasi yang terstruktur untuk menilai kesesuaian kebijakan pariwisata dengan kebutuhan lokal, kecukupan masukan dan perencanaan, kelancaran proses implementasi, serta pencapaian hasil dan dampak program terhadap tujuan pengembangan wisata. Hal ini sejalan dengan praktik evaluasi pariwisata di daerah lain, di mana model CIPP mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program secara komprehensif.

Artikel ini fokus pada evaluasi program atau upaya pengembangan pariwisata di Pulau Maitara dengan menggunakan model CIPP untuk memberikan rekomendasi perbaikan ke depan. Artikel ini tidak hanya memiliki kontribusi teoretis dalam pengembangan model evaluasi pariwisata, tetapi juga kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan stakeholders dalam mengembangkan Pulau Maitara sebagai destinasi wisata bahari unggulan secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus [22], [23]. Peneliti memiliki peran sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri atas beberapa tingkatan, yang bertujuan untuk menggambarkan kompleksitas fenomena utama serta mengonfirmasi keakuratan temuan [24]–[28].

Tempat penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, FGD, observasi dan studi literatur terkait pengembangan pariwisata adalah Pulau Maitara, yang terletak di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai Mei 2025.

3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam konteks pengembangan Pulau Maitara sebagai kawasan wisata bahari, pendekatan CIPP digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan dan program yang telah dirancang dan diimplementasikan dapat menjawab kebutuhan masyarakat lokal, meningkatkan daya saing kawasan, serta mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Evaluasi ini mencakup empat dimensi utama [14], yaitu:

- (1) evaluasi konteks yang menggambarkan latar belakang, kebutuhan, dan relevansi kebijakan;
- (2) evaluasi input yang menilai kelengkapan perencanaan dan sumber daya;
- (3) evaluasi proses yang melihat bagaimana program dilaksanakan di lapangan; dan
- (4) evaluasi produk yang mengkaji hasil, manfaat, dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut.

Keempat dimensi ini akan menjadi dasar dalam menilai kinerja kebijakan dan program pengembangan daya tarik wisata Pulau Maitara, sekaligus memberikan gambaran mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kawasan wisata terpadu berbasis bahari di wilayah kepulauan.

(1) Konteks Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Pulau Maitara

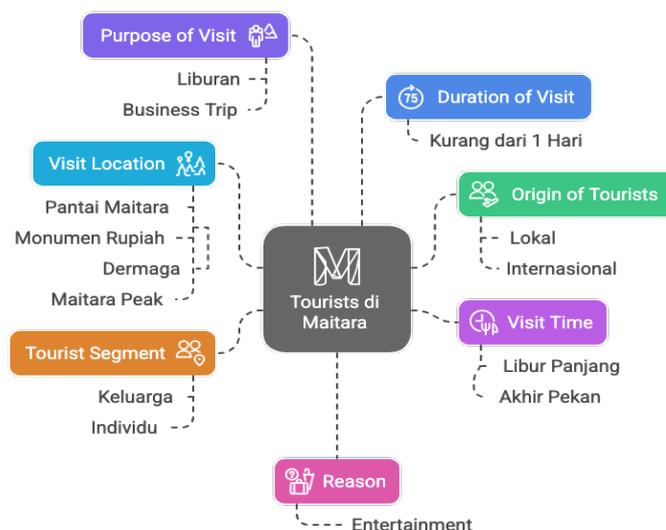
Dalam konteks pengembangan Pulau Maitara sebagai kawasan wisata bahari unggulan, analisis konteks menjadi penting untuk memahami sejauh mana intervensi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sejalan dengan potensi kawasan, ekspektasi masyarakat lokal, dan agenda pembangunan daerah.

Secara geografis, Pulau Maitara memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara Pulau Ternate dan Tidore, serta berada dalam lintasan wisata bahari yang ramai dilalui oleh aktivitas pelayaran lokal. Karakteristik bentang alam yang terdiri atas pantai berpasir putih, kontur bawah laut yang kaya akan terumbu karang, serta peminingan gunung yang ikonik menjadikan Pulau Maitara memiliki daya tarik visual dan ekologis yang tinggi. Citra pulau ini yang tercetak pada lembar uang rupiah menjadi simbol nasional yang memperkuat identitas kawasan sebagai destinasi wisata yang memiliki nilai historis dan representatif.

Pemerintah daerah menyadari potensi strategis tersebut dan meresponnya dengan memasukkan Pulau Maitara ke dalam rencana prioritas pengembangan pariwisata sebagaimana tertuang dalam RIPPDA Kota Tidore Kepulauan 2015– 2029. Kebijakan ini diperkuat melalui berbagai dokumen perencanaan sektoral dan ruang, termasuk penetapan Maitara sebagai sub pusat pengembangan wisata bahari dalam struktur tata ruang pariwisata.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, motivasi utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan yang mampu melibatkan masyarakat lokal secara langsung.

“Pulau Maitara punya potensi besar, tapi belum tergarap maksimal. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai pusat wisata bahari yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat pulau secara langsung” (Wawancara Mendalam dengan Daud Muhammad, Kepala Dinas Pariwisata, 22 April 2025).



Sumber : Penulis, 2025

Gambar 3. Analisis Wisatawan di Pulau Maitara

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Pulau Maitara adalah belum adanya pengelolaan daya tarik wisata yang sistematis. Kegiatan wisatawan yang datang ke pulau ini masih terbatas pada kunjungan singkat tanpa aktivitas lanjutan yang mendorong peningkatan lama tinggal dan konsumsi lokal. Hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian masyarakat.

Selain itu, sektor pendukung seperti perkebunan, perikanan, dan potensi budaya masyarakat belum dikembangkan secara terpadu dalam rangka mendukung pariwisata. Aktivitas pariwisata masih sangat berpusat pada elemen pantai dan laut, tanpa melibatkan kekayaan sosial dan agrikultur lokal sebagai bagian dari ekosistem wisata.

Dari aspek lingkungan, kawasan wisata ini juga menghadapi tantangan serius, seperti penggalan pasir liar yang berpotensi memicu erosi dan longsor. Praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan masih terjadi, sehingga mengancam kelestarian terumbu karang. Penataan kawasan belum maksimal, terlihat dari sanitasi dan drainase yang kurang memadai, serta sistem pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik. Keterbatasan penyediaan air bersih dan belum terbangunnya fasilitas pendukung seperti penginapan, rumah makan, dan sarana umum lainnya turut memperlemah kesiapan Pulau Maitara sebagai destinasi wisata yang layak.

Berdasarkan karakteristik wisatawan, dapat disimpulkan bahwa pola pariwisata di Pulau Maitara masih didominasi oleh wisatawan lokal dengan preferensi kunjungan jangka pendek yang bersifat insidental dan berorientasi pada aktivitas rekreatif alam terbuka. Ketiadaan diversifikasi jenis wisata dan fasilitas penunjang membuat lama tinggal wisatawan sangat terbatas. Maka dari itu, pengembangan ke depan sebaiknya difokuskan pada perluasan atraksi berbasis pengalaman (*experiential tourism*), peningkatan fasilitas inap, serta penciptaan kalender *event* pariwisata untuk menstimulasi kunjungan yang lebih terjadwal dan berkelanjutan.

Keseluruhan permasalahan tersebut menegaskan bahwa pengembangan Pulau Maitara sebagai destinasi wisata unggulan memerlukan pendekatan terpadu. Perlu keterpaduan antara kebijakan pengembangan, penguatan kelembagaan, pelibatan masyarakat, serta konservasi lingkungan secara simultan. Evaluasi konteks ini memperlihatkan bahwa meskipun Maitara memiliki daya saing potensial, strategi pembangunan kawasan memerlukan perencanaan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, evaluasi konteks menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata Pulau Maitara memiliki dasar kebutuhan yang jelas, baik dari sisi potensi wilayah, aspirasi masyarakat, maupun agenda strategis daerah. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program yang inklusif dan responsif terhadap kondisi lokal. Evaluasi konteks ini sekaligus menjadi fondasi bagi analisis selanjutnya mengenai kesiapan input, implementasi proses, dan capaian produk dalam kerangka pengembangan pariwisata berbasis kawasan.

(2) Evaluasi *Input* Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Pulau Maitara

Evaluasi input dalam kerangka model CIPP (Context, Input, Process, Product) berfokus pada penilaian terhadap sumber daya, strategi, dan perencanaan yang mendasari pelaksanaan program pengembangan daya tarik wisata Pulau Maitara. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana input yang tersedia mendukung tercapainya tujuan program secara efektif dan efisien.

a. Dukungan Anggaran dan Ketersediaan Dana

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata pada tahun 2023 sebesar Rp 1,8 miliar. Namun, hanya sekitar 17% yang dialokasikan secara spesifik untuk pengembangan destinasi wisata Pulau Maitara, atau setara dengan Rp. 306 juta. Anggaran tersebut meliputi kegiatan promosi wisata, pelatihan SDM lokal, dan pembangunan fasilitas dasar seperti gazebo dan papan informasi.

b. Sumber Daya Manusia

Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa keterlibatan SDM lokal dalam sektor pariwisata di Pulau Maitara masih bersifat informal dan minim pelatihan. Hanya terdapat 5

orang pemandu wisata lokal tersertifikasi per tahun 2022, sementara pelaku usaha homestay yang aktif tercatat sebanyak 3 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas teknis masyarakat dalam pengelolaan usaha wisata masih rendah.

c. Infrastruktur dan Aksesibilitas

Infrastruktur pendukung seperti dermaga wisata, jalur transportasi, fasilitas air bersih, dan sanitasi belum tersedia secara memadai di Pulau Maitara. Data dari Bappeda menunjukkan bahwa hanya terdapat satu dermaga kecil yang digunakan secara umum, tanpa fasilitas penunjang seperti ruang tunggu atau papan informasi. Akses menuju beberapa spot diving masih harus menggunakan perahu nelayan tanpa stinir keamanan pariwisata. Selain itu, ketersediaan air bersih masih terbatas di beberapa titik pemukiman wisata.

d. Kolaborasi Antar-Stakeholder

Evaluasi input juga mencermati rendahnya integrasi antar pihak, baik antara OPD terkait maupun antara pemerintah dan masyarakat lokal. Belum terbentuk forum kolaborasi resmi atau kelembagaan khusus untuk pengelolaan kawasan wisata Maitara. Meski beberapa kegiatan melibatkan Pokdarwis, keterlibatan mereka masih terbatas pada kegiatan ad hoc. Padahal, pentingnya pelibatan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal sebagai pilar utama dalam strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Ketiadaan forum tetap menghambat proses musyawarah, pembagian peran, serta pelacakan dampak kegiatan.

e. Kesesuaian Input dengan Kebutuhan Lapangan

Analisis kebutuhan menunjukkan adanya ketimpangan antara input yang disediakan dengan kebutuhan aktual masyarakat dan pelaku wisata di lapangan. Program pelatihan belum berbasis kompetensi spesifik seperti pemanduan wisata bahari, *hospitality*, atau manajemen usaha wisata berbasis komunitas. Bahkan, bahan promosi wisata Pulau Maitara masih terbatas pada brosur cetak, tanpa pendekatan digital yang lebih relevan dengan tren wisata saat ini. Menyoroti pentingnya optimalisasi media sosial dan penyediaan aplikasi digital berbasis peta interaktif sebagai upaya memperkuat daya tarik digital (*e-tourism*), yang belum ditindaklanjuti secara operasional hingga kini.

Evaluasi ini menyimpulkan bahwa kualitas input yang tersedia belum sepenuhnya menjawab tantangan dan kompleksitas pengembangan wisata berbasis lokal di Pulau Maitara. Perlu pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based planning*) yang dikembangkan secara partisipatif, agar sinergi antara input, proses, dan output program dapat terjaga secara sistematis dan berkelanjutan.

Secara umum, evaluasi input menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen politik melalui dokumen perencanaan daerah, pelaksanaan program pengembangan daya tarik wisata Pulau Maitara masih menghadapi berbagai keterbatasan input baik dari sisi anggaran, SDM, infrastruktur, maupun koordinasi lintas aktor. Tanpa perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek ini, maka capaian program dikhawatirkan tidak akan optimal. Oleh karena itu, rekomendasi strategis perlu difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan anggaran berbasis prioritas kawasan, serta penyusunan rencana teknis pengembangan destinasi yang partisipatif dan berbasis data lapangan.

Sebagai bagian akhir dari evaluasi input, disarankan agar seluruh pihak terkait melakukan audit kebutuhan (*needs assessment*) secara berkala, dengan menggunakan metode partisipatif yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi. Hasil audit ini menjadi dasar adaptasi input program dari waktu ke waktu, sehingga mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah di Pulau Maitara. Masyarakat lokal di Kota Tidore Kepulauan memegang peran strategis sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan pariwisata, khususnya wisata bahari. Posisi mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga bagian dari sistem sosial dan ekologis yang menjadi basis keberlanjutan pariwisata.

(3) Evaluasi *Process Program* Pengembangan Daya Tarik Wisata Pulau Maitara

Pulau Maitara di Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi pariwisata alam, bahari, dan budaya yang kaya. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, disusunlah Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata Pulau Maitara sebagai panduan pembangunan pariwisata di kawasan ini. Perencanaan tersebut berlandaskan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menitikberatkan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan budaya lokal. Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) digunakan dalam kajian ini untuk menilai keberhasilan program pengembangan pariwisata. Secara khusus, evaluasi difokuskan pada aspek proses (*Process*) guna menilai pelaksanaan program pengembangan daya tarik wisata Pulau Maitara secara sistematis.

Evaluasi aspek proses bertujuan memantau dan menganalisis *tata laksana* program serta bagaimana rencana telah diimplementasikan. Kajian ini akan mengidentifikasi apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, bagaimana koordinasi antarpelaksana, peran regulasi, efektivitas pelaksanaan, serta hambatan yang muncul selama implementasi. Fokus evaluasi proses ini mencakup:

- (1) Tata laksana dan manajemen program, termasuk struktur pengelolaan dan mekanisme kerja;
- (2) Implementasi program di lapangan, yaitu realisasi kegiatan pengembangan sesuai rencana;
- (3) Koordinasi lintas sektor, mencakup sinergi antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
- (4) Regulasi dan kebijakan pendukung, yakni keberadaan aturan yang menunjang pengembangan pariwisata;
- (5) Efektivitas pelaksanaan kegiatan, dilihat dari ketercapaian output sementara dan manfaat awal;
- (6) Tantangan dalam proses implementasi, yaitu kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya.

Beberapa indikator kunci dalam evaluasi proses antara lain mencakup ketepatan jadwal pelaksanaan, kinerja dan keterlibatan sumber daya manusia (staf pelaksana), pemanfaatan sarana prasarana yang disediakan, serta identifikasi hambatan-hambatan selama implementasi. Evaluasi proses juga berfungsi memberikan umpan balik periodik agar pelaksanaan program dapat dikendalikan sesuai prosedur dan dilakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, melalui evaluasi proses, dapat dideteksi sedini mungkin penyimpangan pelaksanaan dari rencana semula, sekaligus diidentifikasi faktor-faktor penghambat yang muncul untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam konteks pengembangan pariwisata Pulau Maitara, aspek proses sangat krusial karena menentukan apakah masterplan yang telah disusun benar-benar diterapkan di lapangan. Proses implementasi harus mencerminkan konsep yang telah direncanakan, yakni pariwisata berprinsip ekowisata, berbasis masyarakat, bahari, dan kreatif.

Implementasi kegiatan merujuk pada pelaksanaan konkrit program-program pengembangan daya tarik wisata di Pulau Maitara sesuai yang direncanakan. Menurut masterplan, konsep pengembangan Pulau Maitara adalah menerapkan ekowisata alam bahari berbasis masyarakat. Untuk mewujudkannya, rencana pengembangan meliputi lima komponen utama:

- (1) pengembangan daya tarik wisata,
- (2) pengembangan fasilitas dan prasarana pariwisata,
- (3) pengembangan sumber daya manusia,
- (4) pengembangan usaha pariwisata, dan
- (5) pengembangan kelembagaan pariwisata di Tingkat desa.

Kelima aspek ini menunjukkan bahwa implementasi program dirancang komprehensif, mencakup pembangunan objek wisata fisik, penyediaan sarana pendukung, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, pengembangan industri pariwisata lokal, serta pembentukan institusi atau kelompok sadar wisata sebagai pengelola di komunitas.

Tidak dapat dipungkiri, berbagai tantangan muncul dalam proses implementasi pengembangan wisata Pulau Maitara. Tantangan ini perlu diidentifikasi dan dianalisis karena merupakan bagian dari evaluasi proses untuk menemukan faktor penghambat yang harus diatasi. Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis dokumen, tantangan utama yang dihadapi antara lain:

- (1) **Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan:** Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala klasik dalam merealisasikan seluruh program sesuai jadwal. Banyak rencana kegiatan yang harus ditunda atau diperkecil skalanya karena dana yang tersedia tiap tahun terbatas. Upaya menggandeng investor swasta belum banyak membuahkan hasil, sehingga pendanaan alternatif minim. Selain itu, sumber daya manusia terampil di bidang pariwisata (seperti pemandu wisata bersertifikat, tenaga pemasaran digital, dll.) masih sedikit. Keterbatasan SDM ini mengakibatkan

beban kerja bertumpu pada segelintir orang dan program pendampingan menjadi kurang luas jangkauannya.

- (2) **Kondisi Geografis dan Infrastruktur:** Sebagai pulau kecil, Maitara memiliki keterbatasan kondisi fisik yang kurang mendukung pembangunan skala besar. Lahan datar untuk fasilitas wisata sangat terbatas karena sebagian besar wilayah merupakan perbukitan dan hutan lindung. Aksesibilitas transportasi bergantung pada cuaca dan ketersediaan kapal, sehingga kontinuitas kunjungan wisatawan tidak selalu terjamin. Infrastruktur dasar seperti sanitasi lingkungan juga masih lemah; kondisi sanitasi yang kurang memadai menimbulkan kekhawatiran terhadap kebersihan kawasan wisata. Tantangan ini membuat pelaksana program harus kreatif menyesuaikan rencana dengan kondisi lapangan, misalnya dengan solusi fasilitas skala kecil yang ramah lingkungan dan peningkatan infrastruktur bertahap.
- (3) **Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:** Meskipun konsep pengembangan adalah berbasis masyarakat, tingkat pemahaman atau kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif masih perlu ditingkatkan. Tidak semua warga serta-merta antusias terjun dalam sektor pariwisata; sebagian masih skeptis atau fokus pada mata pencaharian utama (nelayan/petani). Perubahan mindset memerlukan waktu. Tantangan ini terlihat dari sulitnya merekrut anggota Pokdarwis di beberapa desa dan adanya sebagian warga yang kurang mendukung kegiatan wisata (misal enggan jika pantainya ramai didatangi orang luar). Peningkatan partisipasi memerlukan pendekatan persuasif berkelanjutan, menunjukkan bukti manfaat ekonomi yang nyata bagi mereka. Selain itu, regenerasi kader muda pariwisata perlu disiapkan agar keberlanjutan kelembagaan terjaga.
- (4) **Koordinasi dan Komitmen Pemangku Kepentingan:** Seperti diuraikan sebelumnya, koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga menjadi tantangan. Masih dijumpai ego-sektoral dan perbedaan visi antar pemangku kepentingan. Tidak jarang kebijakan atau program di sektor lain kurang sinkron dengan kebutuhan pengembangan pariwisata. Sebagai contoh, promosi destinasi Maitara belum masuk agenda utama promosi wisata kota/provinsi, sehingga upaya pemasaran destinasi berjalan sendiri. Komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan Maitara dalam anggaran dan program multi-sektor perlu terus dipupuk. Demikian pula, pelibatan swasta dan komunitas harus dibarengi komitmen jangka panjang, bukan sekadar partisipasi sesaat. Ketidakkonsistenan komitmen bisa menghambat kontinuitas program (misal investor mundur di tengah jalan, atau program masyarakat terhenti karena fasilitator luar selesai tugas).
- (5) **Aspek Regulasi dan Legalitas:** Tantangan regulasi juga ada, terutama apabila aturan pendukung belum terbentuk atau disosialisasikan. Ketiadaan Perdes terkait pariwisata di desa, misalnya, membuat beberapa inisiatif komunitas berjalan tanpa aturan tertulis, berpotensi konflik internal. Selain itu, legalitas lahan untuk pembangunan fasilitas wisata kadang menghadapi kendala, mengingat status pulau sebagai tanah ulayat (adat) ataupun milik perorangan. Perlu mediasi dan solusi hukum agar pembangunan fasilitas tidak memicu sengketa lahan. Hal-hal ini menekankan pentingnya percepatan terbitnya regulasi pendukung sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya.
- (6) **Keberlanjutan Lingkungan:** Walau konsep ekowisata diusung, tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Peningkatan aktivitas wisata berisiko mengganggu ekosistem jika tidak dikontrol. Sudah terlihat gejala peningkatan volume sampah saat event wisata, serta potensi kerusakan terumbu karang jika snorkeling/diving tidak diawasi. Menjaga agar pengembangan wisata tidak berdampak negatif pada lingkungan menjadi pekerjaan rumah terus-menerus. Pengawasan dan edukasi perlu diperketat, melibatkan komunitas lokal sebagai garda terdepan konservasi.
- (7) **Penerapan Prinsip Ekowisata (Pariwisata Berkelanjutan):** Konsep ekowisata menuntut kegiatan pariwisata yang *nature friendly*, *community friendly*, dan *tourist friendly*, yakni ramah lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat, dan memberi kepuasan bagi. Dalam pelaksanaannya, program di Maitara sebagian besar telah berupaya menerapkan prinsip ini. Prinsip ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan lokal telah mulai dirasakan, sejalan dengan tujuan pembangunan pariwisata untuk rakyat. Kepuasan wisatawan (*tourist friendly*) juga diperhatikan dengan penyediaan pengalaman unik seperti hidup di desa nelayan, tur mangrove, yang mendapatkan

tanggapan positif dari pengunjung niche ecotourism. Kendati demikian, ada beberapa catatan: pengawasan lingkungan harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi degradasi alam seiring bertambahnya wisatawan; juga perlu dijaga agar penduduk lokal benar-benar menerima manfaat signifikan. Secara keseluruhan, proses implementasi **cukup selaras** dengan konsep ekowisata, meski upaya pelestarian lingkungan dan pemerataan manfaat masih perlu digencarkan.

- (8) **Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Lokal:** Konsep *communitybased tourism* menempatkan masyarakat sebagai subjek (pelaku) utama pariwisata, bukan semata objek. Hal ini telah menjadi ruh dari program di Maitara. Sejak awal, masterplan menegaskan bahwa pariwisata Maitara harus berbasis masyarakat dengan partisipasi aktif komunitas lokal. Dalam implementasi, langkah-langkah pemberdayaan masyarakat telah dijalankan: pembentukan Pokdarwis di tiap desa, pelatihan kapasitas, hingga melibatkan masyarakat dalam perencanaan detail (musyawarah desa wisata). Evaluasi proses menemukan bahwa transfer pengetahuan dan motivasi ke masyarakat harus terus berlanjut agar kapasitas lokal makin tangguh. Secara keseluruhan, arah pemberdayaan masyarakat sudah ontrack sesuai konsep; tinggal memperdalam kualitas dan memperluas cakupan partisipasi untuk keberlanjutan.
- (9) **Pengembangan Wisata Bahari:** Sebagai pulau yang dikelilingi laut, pariwisata bahari merupakan salah satu fokus utama konsep Maitara. Rencana pengembangan menempatkan Maitara sebagai kawasan wisata alam dan bahari unggulan. Implementasi program menunjukkan beberapa langkah konkret dalam pengembangan wisata bahari: eksplorasi spot snorkeling dan diving di seinir pulau, pelatihan selam bagi pemuda lokal, dan pembangunan fasilitas pendukung seperti perahu wisata serta gazebo di pantai. Upaya ini masih dalam tahap awal, namun sudah mengarah pada pemanfaatan potensi bahari secara bertanggung jawab. Prinsip ekowisata bahari diterapkan dengan memastikan ada aturan konservasi, misalnya larangan menyentuh terumbu karang dan kewajiban pemandu mendampingi wisatawan saat snorkeling.
- (10) **Integrasi Kreativitas dan Budaya Lokal dalam Wisata:** Konsep pariwisata kreatif menekankan keunikan lokal, interaksi mendalam wisatawan dengan komunitas, dan aktivitas partisipatif yang mendorong kreativitas. Pada masterplan Maitara, unsur kreatif ini diwujudkan dalam tema wisata budaya dan kuliner, serta pengemasan sejarah, seni, budaya lokal sebagai daya tarik. Evaluasi proses menunjukkan bahwa elemen kreativitas budaya mulai diintegrasikan. Upaya mengemas sejarah lokal juga dilakukan dengan mendirikan galeri kecil tentang sejarah rempah dan peran Maitara, di mana narasi disampaikan oleh pemandu dari masyarakat yang telah dilatih. Hal ini sejalan dengan strategi pengembangan yang mendorong penggalan potensi sejarah jalur rempah dengan melibatkan berbagai pihak termasuk komunitas. Misalnya, pengembangan suvenir unik berbasis ikon Maitara (seperti miniatur uang seribu rupiah yang menampilkan Pulau Maitara) bisa digarap sebagai bagian ekonomi kreatif lokal. Juga, kurasi atraksi seni budaya perlu terus dilakukan agar kualitas pertunjukan tetap terjaga dan inovatif. Secara keseluruhan, proses implementasi telah mengadopsi konsep pariwisata kreatif dan budaya lokal dalam berbagai kegiatan, meski inovasi lebih lanjut tetap diperlukan agar Maitara kian dikenal sebagai destinasi dengan pengalaman wisata yang otentik dan kreatif.

Berdasarkan evaluasi proses menggunakan model CIPP aspek *Process*, pengembangan daya tarik wisata Pulau Maitara telah dimulai dengan kerangka pelaksanaan yang terstruktur namun masih perlu penguatan di berbagai lini. Dari sisi *tata laksana*, telah ada upaya melibatkan masyarakat dan lintas sektor dalam manajemen program, sesuai prinsip perencanaan partisipatif. Implementasi program di lapangan mencakup beragam kegiatan (fisik maupun pemberdayaan) yang sebagian besar mengacu pada rencana, meski beberapa mengalami penundaan. Koordinasi lintas sektor terbukti menjadi faktor kunci: ketika koordinasi berjalan baik (contoh pada event terpadu budaya yang melibatkan berbagai pihak), hasilnya efektif; namun di beberapa aspek, koordinasi yang lemah mengakibatkan keterlambatan atau tumpang-tindih usaha. Regulasi dan kebijakan pendukung mulai disiapkan, namun penyempurnaannya mendesak agar setiap kegiatan punya linisan hukum dan arah yang jelas misalnya aturan konservasi, insentif investasi, dan legalitas kelembagaan lokal.

(4) Evaluasi *Product Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Pulau Maitara*

Evaluasi produk dalam kerangka model CIPP (Context, Input, Process, Product) bertujuan menilai hasil akhir dari program pengembangan yang dijalankan. Pada sub-bab ini akan dibahas capaian akhir program pengembangan daya tarik wisata Pulau Maitara di Kota Tidore Kepulauan, termasuk efektivitas hasil terhadap tujuan yang telah ditetapkan, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal, serta dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan perekonomian setempat. Penilaian dilakukan secara akademis dan sistematis, berdasarkan data kuantitatif maupun kualitatif yang tersedia. Adapun fokus evaluasi produk mencakup:

- a. capaian fisik dan non-fisik yang dihasilkan program,
- b. tingkat pencapaian tujuan (misalnya peningkatan kunjungan wisatawan sesuai target, dll.),
- c. manfaat bagi masyarakat lokal baik secara ekonomi maupun sosial, dan (4) indikasi dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan serta kontribusi ekonomi (misalnya terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD).

Secara umum, program pengembangan wisata Pulau Maitara telah menghasilkan sejumlah keluaran (outputs) konkrit. Realisasi pembangunan fisik kawasan wisata di Maitara mulai tampak sesuai rencana. Beberapa fasilitas penunjang pariwisata telah dibangun atau disiapkan, antara lain pusat informasi pariwisata (*Tourist Information Center/TIC*) di Pulau Maitara, penyiapan rumahrumah warga sebagai homestay, peningkatan fasilitas umum (seperti sarana MCK dan jalur akses), serta pengembangan atraksi seni-budaya lokal melalui event festival. tinggal bersama penduduk lokal.

Capaian akhir yang menonjol adalah peningkatan citra dan daya saing Pulau Maitara sebagai destinasi wisata. Sebagai bukti konkret, salah satu desa di Pulau Maitara berhasil meraih penghargaan 10 Besar Desa Wisata Terbaik Nasional dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 (Gambar 4). Desa wisata Akebay Maitara dipilih menjadi salah satu yang terbaik dari 75 desa wisata se-Indonesia, dan satu-satunya dari Provinsi Maluku Utara yang mencapai prestasi tersebut.



Sumber : Infopublik, 2024

Gambar 4. 1 Desa Akebay Dianugerahi Top 75 Desa Wisata Terbaik ADWI

Penghargaan ini menunjukkan bahwa output program pengembangan di Maitara diakui efektif secara nasional. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari tersedianya fasilitas wisata yang memadai dan inovatif, serta tingginya keterlibatan masyarakat dalam menjadikan lingkungan desanya destinasi yang menarik.

Evaluasi produk juga mempertimbangkan dampak jangka panjang (*outcomes*) dari program, yang mungkin sudah mulai tampak maupun yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang. Dalam konteks Pulau Maitara, dampak jangka panjang yang diantisipasi utamanya terkait kelestarian lingkungan serta perkembangan ekonomi lokal (termasuk kontribusi terhadap PAD daerah dan kesejahteraan berkelanjutan).

Dari perspektif lingkungan, pengembangan wisata Pulau Maitara dirancang sejak awal mengacu pada prinsip *sustainable tourism*. Hasil evaluasi sejauh ini menunjukkan bahwa dampak lingkungan cenderung positif atau terkendali. Tidak terdapat indikasi degradasi lingkungan yang berarti akibat

program wisata. Malahan, beberapa upaya konservasi mendapat dukungan lebih kuat setelah pariwisata berkembang. Contohnya, kawasan mangrove di Desa Maitara Tengah yang dahulu kurang mendapat perhatian, kini dilindungi dan dijadikan wahana wisata edukatif; masyarakat setempat bersama wisatawan kadang melakukan kegiatan penanaman bibit mangrove untuk menjaga garis pantai.

Demikian pula, ekosistem terumbu karang di seinir pulau tetap terjaga karena aktivitas wisata bahari (snorkeling, diving) dijalankan secara bertanggung jawab dengan pendampingan pemandu lokal terlatih, sehingga tidak merusak terumbu. Bahkan terdapat papan-papan interpretasi lingkungan di spot snorkeling yang mengedukasi pengunjung tentang jenis-jenis karang dan pentingnya tidak menginjak karang.

Kebijakan tanpa kompromi terhadap zona lindung juga menjamin keberlanjutan lingkungan pulau. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak diperbolehkan ada pembangunan fisik di hutan bukit Maitara. Hutan kecil di puncak pulau tersebut berfungsi sebagai kawasan tangkapan air dan habitat satwa (misal burung dan serangga endemik). Dengan tetap dilindunginya hutan ini, siklus ekologis pulau tidak terganggu walaupun sektor pariwisata berkembang. Wisata pendakian bukit diarahkan mengikuti jalur yang sudah ada dengan jumlah peserta dibatasi sesuai daya tampung, untuk mencegah erosi dan menjaga pengalaman alamiah. Pengaturan semacam ini akan berdampak jangka panjang menjaga kualitas daya tarik alam Maitara.

Selain itu, peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat dapat berdampak jangka panjang positif. Masyarakat yang telah merasakan manfaat ekonomi dari alam cenderung akan lebih menjaga alam tersebut. Fenomena ini sudah mulai terlihat: warga Maitara kini lebih aktif menjaga kebersihan laut dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena mereka paham kebersihan pantai menarik wisatawan.

Secara umum, transformasi sosial-ekonomi Pulau Maitara akibat program ini diperkirakan berlangsung progresif. Dalam beberapa tahun ke depan, Pulau Maitara berpotensi berubah dari pulau pemukiman nelayan biasa menjadi desa wisata mandiri dengan perekonomian yang lebih beragam.

Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa evaluasi produk program pengembangan daya tarik wisata Pulau Maitara sangat positif. Program ini telah menghasilkan output dan outcome yang selaras dengan harapan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan berpotensi membawa dampak jangka panjang yang menguntungkan bagi lingkungan maupun perekonomian lokal. Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah telah berupaya untuk membangun daya saing daerah dengan membangun tata kelola yang baik sampai ke level desa, termasuk program smart kampung [29]–[32]. Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan ke depan lebih bersifat kuantitatif (skala manfaat diperbesar) dan menjaga keberlanjutan, namun arah perkembangan saat ini sudah berada pada jalur yang benar sesuai kriteria keberhasilan evaluasi produk CIPP. Hasil kajian ini sejalan dengan model evaluasi *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) sebagai salah satu pendekatan evaluasi program yang komprehensif dan berorientasi pada keputusan [13]–[17].

4. Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi program pengembangan daya tarik wisata Pulau Maitara dengan model CIPP, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sesuai dengan masing-masing komponen evaluasi (Context, Input, Process, Product). Kesimpulan ini mencakup pencapaian utama yang telah diraih, kendala atau kekurangan yang teridentifikasi pada tiap aspek, serta implikasinya terhadap keberlanjutan pengembangan wisata di Pulau Maitara.

Aspek Context (Konteks)

Evaluasi konteks menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Pulau Maitara memiliki dasar strategis yang kuat, meskipun terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Secara umum, program ini sejalan dengan kebijakan pariwisata daerah karena Pulau Maitara memiliki potensi wisata bahari dan budaya yang tinggi. Potensi alam-budaya Maitara yang besar memperkuat relevansi program ini. Selain itu, mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan dengan ekonomi terbatas, sehingga pariwisata

menjadi alternatif penghidupan yang penting dan tepat secara konteks. Pencapaian pada aspek ini ialah adanya pengakuan terhadap potensi Maitara dan dukungan kebijakan awal, misalnya penetapan salah satu desa sebagai desa wisata. Namun, kendala konteks meliputi sosialisasi program yang belum optimal sehingga tidak semua pihak memahami tujuan dan manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah tepat, dukungan publik pada tahap awal masih kurang. Implikasinya, kurangnya pemahaman dan dukungan awal masyarakat dapat menghambat pelaksanaan program dan membatasi keberlanjutan inisiatif wisata ini.

Aspek Input

Pada dimensi input, hasil evaluasi menyoroti bahwa ketersediaan sumber daya program masih belum memadai meskipun sudah ada upaya awal. Strategi pengembangan telah disusun dengan konsep ekowisata berbasis masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal. Pemerintah daerah sudah menyediakan alokasi anggaran awal dan membangun sebagian fasilitas dasar (misalnya dermaga kecil) serta mengadakan pelatihan bagi masyarakat. Hal ini merupakan pencapaian positif yang meninikan perhatian pemerintah dan adanya modal sosial awal (kelompok sadar wisata). Namun, input secara keseluruhan masih terbatas: dukungan anggaran relatif kecil sehingga banyak rencana belum terwujud, dan infrastruktur pendukung (akses transportasi, akomodasi, sarana sanitasi) masih minim. Keterbatasan ini juga membuat pemanfaatan budaya lokal belum optimal dan partisipasi masyarakat baru melibatkan segelintir orang. Implikasinya, kekurangan input tersebut menghambat pencapaian tujuan program dan mengancam keberlanjutan, karena tanpa sumber daya cukup pengembangan wisata akan berjalan lambat dan hasilnya tidak optimal.

Aspek Process (Proses)

Dari sisi proses, hasil evaluasi mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengembangan wisata di Pulau Maitara sudah berjalan dengan beberapa kegiatan, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kendala proses tertentu. Pelaksanaan kebijakan di lapangan menunjukkan adanya koordinasi dasar antara instansi terkait dan komunitas lokal. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan, seperti promosi wisata melalui event lokal, pembinaan kelompok sadar wisata, dan upaya konservasi (misalnya bersih pantai dan pelestarian terumbu karang). Hal ini merupakan pencapaian bahwa program telah terealisasi dalam tindakan nyata di lapangan. Namun, koordinasi antarpemangku kepentingan belum optimal dan kerangka regulasi-kelembagaan masih lemah. Terdapat ketidakjelasan pembagian wewenang dan belum ada peraturan khusus untuk pengelolaan wisata Maitara, sehingga pelaksanaan sering berjalan sektoral. Selain itu, monitoring program belum dilakukan secara rutin. Implikasinya, kelemahan proses ini dapat mengurangi efektivitas program dan konsistensi hasil. Jika koordinasi dan tata kelola tidak diperbaiki, sulit memastikan program berjalan terpadu dan mampu beradaptasi, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan pengembangan wisata Maitara.

Aspek Product (Hasil)

Evaluasi terhadap produk/hasil program menunjukkan adanya manfaat nyata yang mulai dirasakan, namun capaian tersebut masih awal dan perlu ditingkatkan. Secara jangka pendek, program telah menghasilkan beberapa output penting: pembangunan fasilitas wisata dasar, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Maitara, dan bahkan penghargaan desa wisata tingkat nasional yang meninikan pengakuan atas upaya ini. Masyarakat setempat juga mulai merasakan dampak ekonomi melalui pendapatan tambahan dari jasa wisata dan homestay, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini merupakan pencapaian berarti mengingat sebelumnya Pulau Maitara kurang dikenal sebagai destinasi wisata. Namun, hasil jangka panjang belum optimal: peningkatan kunjungan dan pendapatan masih di bawah target, kontribusi pariwisata Maitara terhadap PAD daerah rendah, dan dampak ekonomi belum merata dirasakan masyarakat. Aspek kelestarian lingkungan juga rentan terganggu jika pertumbuhan wisata tidak diimbangi pengelolaan yang memadai (misalnya ancaman sampah dan kerusakan terumbu karang). Implikasinya, tanpa peningkatan berkelanjutan dalam hasil dan mitigasi dampak negatif, program

mungkin tidak memberikan manfaat jangka panjang sesuai harapan. Perlu upaya konsisten agar pertumbuhan wisata sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terjaganya lingkungan.

Daftar Pustaka

- [1] E. Sutrisno, "Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata," *J. Lemhannas RI*, vol. 9, no. 1, pp. 167–185, 2021.
- [2] R. Solihin, I., Jumanah, J., Nugroho, A., Cahyani, Y. D., Auladatsiyifa, I. R., & Herdiana, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pasca Pandemic di Indonesia.," *J. Adm. dan Kebijak. Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 186–204, 2023.
- [3] R. Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia," 2013.
- [4] M. I. N. Syamsuddin, R., & Fuady, "Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 4, no. 1, p. 63, 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>
- [5] S. Z. Theodoulou and C. Kofinis, *The art of the game: Understanding American public policy making*. Recording for the Blind & Dyslexic, 2004.
- [6] S. Patadjenu, "Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara." Politeknik STIA LAN Jakarta, 2023.
- [7] L. Minnaert, R. Maitland, and G. Miller, "What is social tourism?," *Curr. Issues Tour.*, vol. 14, no. 5, pp. 403–415, 2011, doi: 10.1080/13683500.2011.568051.
- [8] L. Minnaert, A. Diekmann, and S. McCabe, "Defining social tourism and its historical context," *Soc. Tour. Eur. Theory Pract.*, pp. 18–30, 2012.
- [9] L. Minnaert, "Social tourism participation: The role of tourism inexperience and uncertainty," *Tour. Manag.*, vol. 40, pp. 282–289, 2014.
- [10] A. Ardhiyansyah, N. W. Sulistyowati, N. Hidayati, and E. Handayani, "Inovasi berkelanjutan: pendekatan kolaboratif untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi di provinsi jawa barat," *J. Pengabd. West Sci.*, vol. 2, no. 06, pp. 460–467, 2023.
- [11] I. A. P. Widiati and I. Permatasari, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung," *Kertha Wicaksana*, vol. 16, no. 1, pp. 35–44, 2022.
- [12] M. S. Wibowo and L. A. Belia, "Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan," *J. Manaj. Perhotelan Dan Pariwisata*, vol. 6, no. 1, pp. 25–32, 2023.
- [13] D. Stufflebeam, "Evaluation models," *New Dir. Eval.*, vol. 2001, no. 89, pp. 7–98, 2001.
- [14] D. L. Stufflebeam, "The CIPP model for evaluation," in *Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation*, Springer, 2000, pp. 279–317.
- [15] D. L. Stufflebeam and G. Zhang, *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Publications, 2017.
- [16] D. L. Stufflebeam and C. L. S. Coryn, *Evaluation theory, models, and applications*. John Wiley & Sons, 2014.
- [17] A. L. C. Basantes, E. I. R. Cargua, and I. E. R. Cargua, "Análisis crítico de los modelos de Stake, Modelo CIPP de Stufflebeam y la evaluación basada en objetivos de Tyler," *Rev. Imaginario Soc.*, vol. 7, no. 3, 2024.
- [18] M. H. Akbar and R. Fitriati, "The Policy Implementation of DKI Jakarta Provincial Government Social Cash Assistance During COVID-19 Pandemic," *J. Inov. Apar.*, vol. 5, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.54849/monas.v5i1.139>.
- [19] Y. Luo, H. Jiang, and L. Zeng, "Linking Informative and Factual CSR Communication to Reputation: Understanding CSR Motives and Organizational Identification," *Sustainability*, vol. 15, no. 6, p. 5136, 2023, doi: 10.3390/su15065136.
- [20] H. Tuna and M. Başdal, "Curriculum evaluation of tourism undergraduate programs in Turkey:

- A CIPP model-based framework," *J. Hosp. Leis. Sport Tour. Educ.*, vol. 29, p. 100324, 2021.
- [21] K. Puspitasari, "Role Of Village Capacity Building In Increasing Original Village Income From The Tourism Sector: A Case Study Of Organization Output," *J. Glob. Tour. Technol. Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 27–35, 2024.
- [22] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods 6th Edition*, Third Edit. London: SAGE Publications, Inc, 2017.
- [23] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- [24] J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United State of America: SAGE Publications, 2022.
- [25] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, 2023. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=pwjMEAAAQBAJ>
- [26] Y. S. Lincoln, E. G. Guba, and J. J. Pilotta, "Naturalistic inquiry," *Int. J. Intercult. Relations*, vol. 9, no. 4, pp. 438–439, 1985, doi: 10.1016/0147-1767(85)90062-8.
- [27] N. K. Denzin and Y. S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications, 2019.
- [28] N. K. (red. . Denzin and Y. Lincoln, *Handbook of Qualitative Reserch*. 2000.
- [29] R. Putra, Muhammad Ganesha, Fitriati, "Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah Kota Palembang," *J. Gov. Innov.*, vol. 5, no. 2, pp. 308–326, 2023, doi: 10.36636/jogiv.v5i2.3190.
- [30] N. Irawan and R. Fitriati, *Implementasi Proses Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Desa : "Program Desa BPJS Mandiri."* Jakarta: 4Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, 2020.
- [31] R. P. Fitriah and R. Fitriati, "Governance Dalam Program Tangerang Gemilang," vol. 6, no. 4, pp. 1236–1250, 2023.
- [32] N. Irawan and R. Fitriati, *Tata Kelola Pemerintah Desa Program Desa Wisata Lingkungan dan Budaya Berbasis Community Based Tourism*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, 2020.